

RINGKASAN LAPORAN BULANAN INSPEKTORAT BULAN JANUARI 2020

Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan ini memberikan informasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal yang dicapai pada bulan Januari tahun 2020, yaitu :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2020 sebesar Rp5.196.407.667,00 atau sebesar 60,30% dari rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2020 lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebesar Rp8.618.093.267,00.

Jika dibandingkan dengan total anggaran, persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 sebesar 5,98% atau lebih rendah dari rencana penyerapan yang ditetapkan yaitu sebesar 9,91%.

Unit Kerja	Pagu (x1.000,-)	Rencana s.d. Bulan Januari 2020		Realisasi s.d. Bulan Januari 2020	
		Rp	%	Rp	%
		(x1.000,-)		(x1.000,-)	
Inspektorat Jenderal	86.966.609	8.618.093,27	9,91	5.196.407,67	5,98
Inspektorat Wilayah I	4.873.270	709.536,20	14,56	652.293,60	13,39
Inspektorat Wilayah II	4.939.058	422.302,00	8,55	645.568,94	13,07
Inspektorat Wilayah III	5.649.268	400.950,00	7,10	868.019,10	15,37
Inspektorat Wilayah IV	5.155.490	263.865,07	5,12	600.815,13	11,65
Inspektorat Investigasi	5.410.920	31.600,00	0,58	0	0,00
Sekretariat Inspektorat Jenderal	60.938.603	6.789.840,00	11,14	2.429.710,89	3,99

Realisasi per kegiatan sebagai berikut:

No	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI JANUARI	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	21.518.053.000	325.402.669	1.51
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.829.484.000	-	0.00
3	Layanan Perkantoran	35.591.066.000	2.104.308.225	5.91
4	Layanan Audit Internal	20.617.086.000	2.766.696.773	13.42
5	Layanan Penanganan Dumas	3.500.000.000	-	0.00
6	Layanan Pemb ZI Menuju WBK/WBBM	1.910.920.000	-	0.00
	Jumlah	86.966.609.000	5.196.407.667	5.98

2. Kegiatan *consulting* yang dilakukan pada bulan Januari adalah kegiatan pendampingan persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019 oleh BPK RI pada UPT Kementerian LHK di Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pelayanan Pengaduan Masyarakat, pada bulan Januari telah diterima 8 pengaduan masyarakat (Dumas) yang disampaikan melalui surat sebanyak 6 Dumas dan media

online sebanyak 2 Dumas. Substansi Dumas yang diterima pada bulan Januari tahun 2020 masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pelanggaran disiplin / kode etik.

4. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP *Online* Pada bulan Januari tahun 2020 telah dilaksanakan bimtek penggunaan aplikasi penyelenggaraan SPIP Online kepada Satker Pusat lingkup Kementerian LHK dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 152 orang. Peserta tersebut merupakan ketua dan anggota Satgas SPIP dari 76 Satker Pusat.

Selain Satker Pusat, bimtek penggunaan aplikasi penyelenggaraan SPIP *Online* direncanakan akan diberikan kepada UPT lingkup Kementerian LHK. Bimtek dilaksanakan di 4 kota, yaitu Surabaya, Makassar, Medan dan Denpasar pada bulan Februari tahun 2020.

5. Penilaian mandiri maturitas SPIP KLHK. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2020, Sekretaris Inspektorat Jenderal telah menyampaikan permohonan personil Tim Penilai Maturitas SPIP kepada seluruh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan lingkup Kementerian LHK melalui surat nomor S.22/Setjen/ALHP/Was.7/1/2020 tanggal 9 Januari 2020.
6. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka persiapan pelaksanaan PMPRB Tahun 2020, Sekretaris Inspektorat Jenderal telah menyampaikan permohonan personil Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan lingkup Kementerian LHK melalui surat Nomor S.22/Setjen/ALHP/Was.7/1/2020 tanggal 9 Januari 2020.
7. Progres pelaporan LHKPN dan LHKASN bulan Januari tahun 2020:

Pelaporan	Wajib Laporan	Sudah Laporan		Belum Laporan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
LHKPN	399	281	70.43	118	29.57
LHKASN	15.932	6.688	41.98	9.244	58.02